

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Riewanto et. al, *Buku Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2023
- Arief Hidayat, "Negara Hukum Berwatak Pancasila
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Gafika, 1996
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013
- Zulkarnain Ridlwan, *Sejarah Hukum Tata Negara Indonesia*, Lampung: Pusaka Media, 2020
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Makassar: Prenada Media Group, 2019.
- Hasan Zaini, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1971
- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007
- M. Syamsudin, Mahir Meneliti Permasalahan Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana, 2021
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI, 2017
- Maruarar Siahaan, *Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2015
- Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016
- Moh. Mahfud MD., *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2000.
-, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakri, 2014

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2003

Stefanus Sampe, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Manado : Buku Referensi, 2022

Susanti, dkk, *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022

Tim Pengkajian Hukum tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005

UU Nurul Huda, *Hukum Partai Politik & Pemilu Di Indonesia*, Makassar: Fokusmedia, 2018

SKRIPSI

Indah Purwakasari, *Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, (Yogyakarta: Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), 2012, 4.

JURNAL

Ahmad Basarah, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No. 1, (Januari 2014), 2. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.1-8>

Anna Triningsih, “Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, (9 Maret 2016), 125-144. <https://www.neliti.com/id/publications/113880/politik-hukum-pengujian-peraturan-perundang-undangan-dalam-penyelenggaraan-negara>

Delfina Gusman, “Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan Negara,” *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 8, no. 3, (19 November 2024), 655-665. <https://doi.org/10.31933/xb14st09>

- Indra Rahmatullah, Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, vol. 4, no. 2, (2020), 39-44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>
- Islamiyati dan Dewi Hendrawati, “Analisis Politik Hukum dan Implementasinya,” Law Development Justice Review, Vol. 2, No. 2, (Mei 2019), 104-117. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i1.5139>
- Jailani, “Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan,” Jurnal Inovatif, vol. 8, no. 1, (Januari 2015), 134-147.
- Jamil, Arnita, “Sistem Pemerintahan Presidensil Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 10, No. 02, (5 Januari 2021), 189-202. <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/163>
- Josua Satria, “Analisis Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Menteri Dalam UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan Konstitusi RIS dan UUDS RI”, Jurnal Hukum Lex Generalis 1, No. 5, (Agustus 2020), 26-37
- Krisyando & Umbu, “Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial”, Jurnal USM Law Review 8, No. 1, (2025), 144-157
- M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia,” Jurnal Yustisia 2, No. 3, (September–Desember 2013), 121-124
- M Syahnan Harahap, “Perbedaan Konsepsi Rechtstaat Dan The Rule Of Law Serta Perkembangan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Administrasi Negara,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 1, No. 1, (21 April 2018), 48-54. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.102>
- Mario Agritama, “Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara,” Constitution Journal, vol. 1, no. 2, (9 Desember 2022), 170-188. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>
- Ni'matul Huda, “Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, vol. 8, no. 18, (Oktober 2001), 6. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art1>
- Reynaldi Jodi dan Stefanus Sianturi, “Eksistensi Penerapan Trias Politica Dalam Pemisahan Kekuasaan Yang Sejajar Beserta Dampaknya Terhadap Kekuatan Lembaga Negara Independen,” Dinamika Hukum dan Masyarakat, vol. 5, no. 1, (14 April 2022), 1-9.

- Retno Saraswati, "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif," *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 41, no. 1, (Jan. 2012), 139. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143>
- Ria Noviantika dan M. Shofwan Taufiq, "Eksistensi Kementerian Negara Dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara," *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2021). <http://dx.doi.org/10.24127/lr.v5i1.1496>
- Schadler dalam Dhea & Arya, "Analisis Faktor-Faktor Utama Dalam Konsolidasi Demokrasi di Tunisia di Arab Spring", *Jurnal Balcony* 2, No. 1, (2018), 56-66
- Sunarto, "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 2, (April 2016), 157-163. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>
- Teguh Satrio Prakoso, "Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, No. 3, (September 2021), 1487
- Timothy Pradhitya, "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Res Publica* 4, No. 2, (Mei–Agustus 2020), 221-232

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabinet Susanto/Peralihan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabinet Halim;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabinet Mohammad Natsir;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1951 tentang Pembentukan Kabinet Sukiman;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabinet Wilopo;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1953 tentang Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo I;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabinet Ali Sastroamidjojo II;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1957 tentang Pembentukan Kabinet Djuanda;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabinet Kerja I;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1960 tentang Pembentukan Kabinet Kerja II;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 1962 tentang Reorganisasi Kabinet Kerja;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1963 tentang Susunan Baru dan Regrouping Kabinet Kerja;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabinet Dwikora II;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1966 tentang Susunan Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1967 tentang Perubahan Struktur Dan Susunan Personalia Kabinet Ampera;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183/M Tahun 1968 tentang Pembubaran Kabinet Ampera dan Pembentukan Kabinet Pembangunan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1971 tentang Pemberhentian Sebagian Menteri Kabinet Perjuangan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Kabinet Pembangunan II;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Pembangunan III;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Pembangunan IV;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Pembangunan V;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Pembangunan VI;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 1998 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Pembangunan VII;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Reformasi Pembangunan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 335/M Tahun 1999 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Periode Tahun 1999 -2004;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 -2004;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2004-2009;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

WEBSITE

Arijjal Rahman, “APBN 2025 Bakal Bengkak Imbas dari Kabinet Gemuk,” Sabtu 11 Oktober 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241212061151-4-595290/apbn-2025-bakal-bengkak-imbis-dari-kabinet-gemuk#:~:text=Jakarta%2C%20C>

[NBC%20Indonesia%20%2D%20Kementerian%20Keuangan,itu%20masih%20dalam%20tahap%20penelaahan.](#)

CNN Indonesia, “Infografis: 229 Ribu ASN Terdampak Penambahan Jumlah Kementerian,” Sabtu 11 Oktober 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241029141413-23-1160803/infografis-229-ribu-asn-terdampak-penambahan-jumlah-kementerian>

VOA, “Prabowo Umumkan Kabinet Merah Putih; Jumlah Menteri Terbanyak Sejak 1966,” Selasa 19 Agustus 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/prabowo-umumkan-kabinet-jumlah-menteri-terbanyak-sejak-1966/7829143.html>

Sapto Yunus, “Serba Serbi Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah,” Minggu, 6 September 2025, <https://www.tempo.co/politik/serba-serbi-pembentukan-kementerian-haji-dan-umrah-2063425>

Susana Rita, “Seberapa Besar Potensi Pembengkakan Anggaran Karena Gemuknya Kabinet Prabowo,” Sabtu 11 Oktober 2025, https://www.kompas.id/artikel/seberapa-besar-potensi-pembengkakan-anggaran-karena-gemuknya-kabinet-prabowo?status=sukses_login&login=1729581569188&open_from=header_button&loc=header_button.

Media Indonesia, “Tertekan Jumlah Kemeterian,” Selasa 19 Agustus 2025, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/tertekan-jumlah-kementerian>

BBC News Indonesia, “Prabowo Melantik Jajaran Menteri dan Wakil Menteri - Kabinet Tergemuk Sejak Orde Baru hingga Reformasi,” Selasa 19 Agustus 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr4xgkz2l3ro>

Matius Alfons, “Menteri HAM Minta ANgggaran Rp 20 T, Komisi XIII DPR: Koordinasi Dulu,” Selasa 19 Agustus 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7607016/menteri-ham-minta-anggaran-rp-20-t-komisi-xiii-dpr-koordinasi-dulu>

Rikson Pandapotan, “Penambahan Jumlah Kementerian dan Efisiensi Pemerintahan Prabowo,” Selasa 19 Agustus 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/08/07000061/penambahan-jumlah-kementerian-dan-efisiensi-pemerintahan-prabowo?page=all>

<https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/dasar-hukum2>

Sumber diolah oleh Penulis yang bersumber pada Kementerian Sekretariat Kabinet <https://setkab.go.id/profil-kabinet/>